PONTIANAK POST

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sept Okt Nov Des | 2018 | Hal.: 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Wabup Tegur Tiga SKPD

Belum Tuntas Entri Data Aset

PUTUSSIBAU – Wakil Bupati (Wabup) Kapuas Hulu Antonius L Ain Pamero menegur tiga organisasi perangkat daerah (OPD) yang belum selesai entri data aset. Ketiganya didesak dia agar segera menyelesaikannya. Tiga OPD yang dimaksud adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Dinas Perhubungan (Dishub), serta Sekretariat Daerah (Setda).

"Selisi entri aset pada Disdikbud Rp50 miliar, Setda Rp20 miliar, Dishub Rp1 miliar, ini harus segera diselesaikan," tegas Wabup dalam pertemuan yang berlangsung di Aula Setda Kapuas Hulu, belum lama ini. Diingatkan Wabup bahwa Bupati AM Nasir sudah memberikan waktu 3 bulan untuk menyelesaikan entri data aset tersebut. Namun, dia menyayangkan, masih ada OPD yang ternyata belum menyelesaikannya.

"Waktu sudah diberikan Bupati selama 3 bulan, seharusnya sudah selesai. Apabila OPD ada hambatan, konsultasikanlah dengan BKD (Badan Keuangan Daerah). Petugas untuk aset di BKD *standby* sampai jam 2 malam," ungkap Wabup menyayangkan.

Karena sudah masuk tahun 2018, Wabup meminta agar tiga OPD yang belum rampung entri data aset ini serius menindaklanjuti hal tersebut. Pasalnya, ditegaskan Wabup, kalau tidak selesai, akan merusak hasil kerja keras OPD secara keseluruhan. "Entri data aset ini sudah lebih dari setengah di Kapuas Hulu selesai. Jangan sampai karena ada yang belum selesai, lalu hasilnya tidak bagus, sementara yang lain sudah kerja keras," sergahnya.

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu serius membenahi data aset daerah. Dalam tahun 2017 sendiri, entri data aset dari seluruh kecamatan se-Kapuas Hulu sudah rampung. Sementara untuk OPD di tingkat kabupaten hanya tiga yang belum rampung data asetnya.

Pemkab gencar membenahi masalah aset untuk mengejar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari auditor yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Sebab permasalahan aset membuat Pemkab Kapuas Hulu menjadi batu sandungan untuk menggapai opini tersebut. ***(aan)***